

**STRATEGI PENINGKATAN NILAI INDEKS TATA KELOLA  
PENGADAAN PADA INDIKATOR *E-PURCHASING* DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN**

Disusun Oleh:

NAMA : ACHMAD TAUFIK  
NPM : 2143021015  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
PROGRAM STUDI : MAGISTER TERAPAN  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister  
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

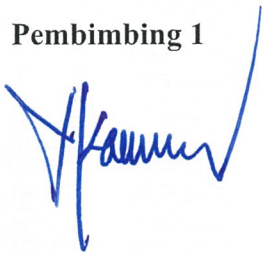
Nama : ACHMAD TAUFIK  
NPM : 2143021015  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan pada  
Indikator *E-Purchasing* Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

*Strategy for Increasing Procurement Governance Index Scores on  
E-Purchasing Indicators in The Ministry of Health*

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan

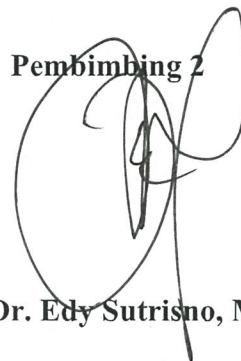
Pembimbing Tesis

Pembimbing 1



Prof. Dr. R Luki Karunia,  
S.E., Ak. MA CA. CACP

Pembimbing 2



Dr. Edy Sutrisno, M.Si

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Achmad Taufik  
NPM : 2143021015  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola  
Pengadaan pada Indikator *E-Purchasing* Di  
Lingkungan Kementerian Kesehatan  
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategy for Increasing Procurement  
Governance Index Scores on E-Purchasing  
Indicators in The Ministry of Health*

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan  
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga  
Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 11 November 2024  
Pukul : 14.30 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PENGUJI TESIS :**

Ketua Sidang : Dr. Firman Hadi Rivai  
Sekretaris : Dr. Hamka, MA  
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA  
Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si



## SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Taufik  
NPM : 2143021015  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan akhir yang telah saya buat ini dengan judul **“Strategi Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Pada Indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 11 November 2024

Penulis,



Achmad Taufik

## ABSTRAK

### **Strategi Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Pada Indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan**

Achmad Taufik

taufik.achmad1506@gmail.com

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik merupakan salah satu indikator sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi. Salah satu indikator pada ITJP adalah pemanfaatan *e-purchasing* dan Kementerian Kesehatan belum pernah mendapatkan nilai untuk indikator tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab nilai ITKP khususnya pada indikator *e-purchasing* masih 0 dan bagaimana menyusun strategi peningkatan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan juga telaah dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* masih 0 diantaranya faktor prosedur yang belum dilakukan sampai dengan selesai, faktor sumber daya manusia yang masih kesulitan dalam membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi pada sistem, faktor metode bahwa surat edaran dan sosialisasi pernah dibuat belum efektif, dan faktor eksternal yaitu penyedia barang/jasa yang juga punya andil dalam penyelesaian paket *e-purchasing*. Strategi yang direkomendasikan untuk penyelesaian masalah adalah dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai alur proses pelaksanaan *e-purchasing* oleh tim kerja khusus, selain itu dapat dibuat aplikasi/tools monitoring untuk membantu memantau pelaksanaan paket *e-purchasing*, melakukan perhitungan kembali terhadap beban kerja guna memastikan kualitas pekerjaan penyelesaian administrasi pada sistem, dan melakukan sosialisasi kepada PPK/PP agar menambahkan klausul pada kontrak terkait kewajiban penyedia untuk menyelesaikan kewajiban administrasi pada sistem katalog elektronik.

Kata Kunci : Strategi, Indeks Tata Kelola Pengadaan, *e-purchasing*, Pengadaan Barang/Jasa

## **ABSTRACT**

### ***Strategy to Increase the Procurement Governance Index Value on e-purchasing Indicators within the Ministry of Health***

Achmad Taufik

taufik.achmad1506@gmail.com

*The Minimum Good Procurement Governance Index (ITJP) is one of the indicators of a Clean and Accountable Bureaucracy target as stated in the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Regulation Number 25 of 2020 concerning the Bureaucratic Reform Road Map. One of the indicators in ITJP is the use of e-purchasing and the Ministry of Health has never received a score for this indicator. This study aims to identify the causes of the ITKP value, especially in the e-purchasing indicator, which is still 0 and how to develop a strategy to increase the ITKP value for the e-purchasing indicator within the Ministry of Health. The method used is a qualitative method by conducting interviews and also reviewing documents. The results of the study found that there are factors that cause the ITKP value for the e-purchasing indicator to be 0, including procedural factors that have not been carried out to completion, human resource factors that still have difficulty in dividing the time to complete administrative work on the system, method factors that circulars and socialization have been made ineffective, and external factors, namely bar / service providers who also have a hand in completing the e-purchasing package. The recommended strategy for problem solving is to provide socialization and technical guidance on the flow of the e-purchasing implementation process by a special work team, in addition, applications / monitoring tools can be created to help monitor the implementation of the e-purchasing package, recalculate the workload to ensure the quality of administrative completion work on the system, and conduct socialization to PPK / PP to add clauses to the contract related to the provider's obligation to complete administrative obligations on the electronic catalog system.*

*Keywords: Strategy, Procurement Governance Index, e-purchasing, Procurement Goods/Services Procurement*

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: “Strategi Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Pada Indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap) pada Program Pascasarjana (S2) Magister Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dari awal sampai akhir penelitian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, ucapan terimakasih penulis ucapkan terkhusus kepada:

1. Ibu Prof Nurliah Nurdin selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Dr. R. Luki Karunia.MA dan Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, Bapak Dr. Hamka, MA dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA sebagai penguji/pembahas yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan beserta seluruh jajaran yang telah berkenan untuk memberikan ijin penelitian dan memberikan akses untuk pengumpulan data terkait penelitian ini.
5. Rekan-rekan Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Tim Kerja Katalog yang selalu mendukung dalam menyelesaikan izin belajar dari awal hingga selesai

6. Rekan-rekan MKN Angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan.
7. Kepada keluargaku tercinta yang tidak pernah lelah untuk selalu memberikan dukungan dan do'a.

Jakarta, 11 November 2024

Penulis,

Achmad Taufik



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Permasalahan.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis .....	17
C. Kerangka Berpikir.....	51
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Metode Penelitian.....	53
B. Teknik Pengumpulan Data.....	54
C. Instrumen Penelitian .....	56
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum terkait Kementerian Kesehatan.....	60
B. Penyajian Hasil Penelitian dan Analisis .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Predikat ITKP .....	1
Tabel 1.2. Tabel Penilaian Akhir ITKP Kementerian Kesehatan Tahun 2021 .....	3
Tabel 1.3. Tabel Penilaian Akhir ITKP Kementerian Kesehatan Tahun 2022 .....	3
Tabel 1.4. Tabel Penilaian Akhir ITKP Kementerian Kesehatan Tahun 2023 .....	4
Tabel 1.5. Tabel Nilai ITKP Kementerian/Lembaga Tahun 2022 dan 2023 untuk Indikator <i>e-Purchasing</i> Berdasarkan Pagu Tertinggi Tahun 2023 .....	4
Tabel 1.6. Tabel Jumlah Kementerian/Lembaga yang Gagal Mendapatkan Nilai ITKP pada Setiap Indikator Tahun 2022 dan 2023 .....	5
Tabel 2.1. Perbandingan dengan penelitian terdahulu .....	9
Tabel 4.1. Penyelesaian Paket <i>e-purchasing</i> Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022 .....	65
Tabel 4.2. Penyelesaian Paket <i>e-purchasing</i> Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 .....	65
Tabel 4.4. Matriks SWOT .....	

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Strategi Peningkatan Nilai ITKP untuk Indikator <i>e-purchasing</i> .....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan .....	61
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa .....	63
Gambar 4.3 Penilaian Final ITKP Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 .....	67
Gambar 4.4 Penilaian Final ITKP Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 .....	68
Gambar 4.5 Surat Rapat Pembahasan Pencapaian ITKP Kemenkes dengan Inspektorat Jenderal .....	77
Gambar 4.6 Surat Edaran Mengenai Strategi Peningkatan ITKP Kementerian Kesehatan Tahun 2023.....	78
Gambar 4.7 Undangan Sosialisasi ITKP Kemenkes.....	79
Gambar 4.8 SK Sebagai PPK Vaksin Tahun 2023 .....	72
Gambar 4.9 SK Sebagai Ketua Tim Kerja Katalog Elektronik Sektoral .....	73
Gambar 4.10 SK Sebagai PPK Alkes Tahun 2023 .....	75
Gambar 4.11 SK Sebagai Pokja Pemilihan.....	76
Gambar 4.12Tangkapan Layar Panduan Penggunaan Sistem Katalog Elektronik	81
Gambar 4.13 Tangkapan Layar Daftar Paket pada Sistem Katalog Elektronik....	83

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

# BAB I

## PERMASALAHAN PENELITIAN

### A. Latar Belakang

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan indikator yang digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengevaluasi tata kelola pengadaan, berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator “Antara” dalam Indeks Reformasi Birokrasi menjelaskan ITKP Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sitem Pengadaan, yang terdiri dari:
  - a. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
  - b. *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Terbagi)
  - c. *E-purchasing*
  - d. *Non E-Tendering* dan *Non E-purchasing*
  - e. E-Kontrak
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Predikat hasil ITKP Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

Tabel 1.1.  
Tabel Predikat ITKP

No	Predikat	Nilai
1	Istimewa	Nilai 100 (seratus)
2	Sangat Baik	Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh)

3	Baik	Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh)
4	Cukup	Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
5	Kurang	Nilai < 50 (kurang dari lima puluh).

Sumber: Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021

LKPP telah melakukan tiga kali penilaian terhadap ITKP sejak penjelasan tentang ITKP diedarkan. Pada Tahun 2021 LKPP melakukan penilaian ITKP terhadap 83 kementerian/lembaga, penilaian disampaikan dengan surat LKPP Nomor 27613/SES/12/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penyampaian Data terkait Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan hasil 9 kementerian/lembaga mendapat predikat Baik dan 12 kementerian/lembaga berpredikat Cukup, sedangkan sebagian besar atau 62 kementerian/lembaga masih berpredikat Kurang. Selanjutnya untuk penilaian ITKP Tahun 2022 berdasarkan informasi pada <https://siukpbj.lkpp.go.id> per tanggal 22 November 2022 dilakukan penilaian terhadap 82 kementerian/lembaga, sebanyak 14 kementerian/lembaga mendapatkan predikat Baik dan 11 kementerian/lembaga berpredikat Cukup dan sisanya atau 57 kementerian/lembaga masih menyangang predikat Kurang.

Penilaian ITKP untuk Kementerian Kesehatan pada Tahun 2021 hanya mendapatkan predikat Kurang dengan nilai akhir 45,68% hasil dari akumulasi penilaian 4 indikator dan sub indikator yang dinilai pada Tahun 2021. Untuk penilaian perencanaan pengadaan pada SiRUP mendapatkan nilai 5,34 dari maksimal nilai 10 yang seharusnya bisa didapatkan, berikutnya adalah penilaian terhadap pelaksanaan E-Tendering yang pada penilaian ITKP tahun 2021 nilai maksimalnya adalah 20, sedangkan nilai akhir yang didapatkan oleh Kementerian Kesehatan untuk E-Tendering adalah 14,60. Selain itu Indikator Kualifikasi Kompetensi PBJ dan Tingkat Kematangan UKPBJ hanya mendapatkan nilai 7,96

dan 17,78 dari nilai maksimal yang seharusnya bisa didapatkan masing-masing indikator adalah 30 dan 40.

Tabel 1.2.  
Tabel Penilaian Akhir ITKP Kementerian Kesehatan Tahun 2021

Nama K/L	Nilai Per Indikator				Total Nilai dengan Pembobotan	Predikat
	SiRUP	E-Tendering	Kualifikasi Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ		
Kementerian Kesehatan	5.34	14.60	7.96	17.78	45.68	Kurang

Sumber <https://siukpbj.lkpp.go.id>

Pada Tahun 2022 penilaian terhadap ITKP Kementerian Kesehatan Kembali dilakukan, dengan 7 indikator yang dinilai. Indikator SiRUP masih memiliki bobot yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu nilai maksimal 10, nilai yang didapat untuk tahun 2022 adalah 6 atau naik 0,66 poin dari tahun sebelumnya. E-Tendering untuk tahun 2022 terdapat perbedaan bobot penilaian, tahun sebelumnya nilai maksimal untuk E-Tendering adalah 20 sedangkan tahun 2022 nilai maksimalnya adalah 5 dan nilai ITKP Kementerian Kesehatan untuk indikator E-Tendering sudah cukup baik yaitu 4,9. Tetapi sayangnya nilai untuk indikator Non E-Tendering/Non *E-purchasing* dan E-Kontrak masih belum cukup baik, yaitu 2,9 dan 2,8 dari nilai maksimal masing-masing indikator adalah 5, sedangkan untuk indikator Kualifikasi Kompetensi SDM PBJ dan Tingkat Kematangan UKPBJ mendapat nilai 7,20 dan 35,60 dari nilai maksimal masing-masing adalah 30 dan 40.

Pada tahun 2022 dan 2023 nilai ITKP Kementerian Kesehatan secara total sudah terdapat peningkatan tetapi untuk indikator *e-purchasing* masih belum mendapatkan nilai (0.00) sebagaimana pada tabel 1.3 dan 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.3.  
Tabel Penilaian Akhir ITKP Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Nama K/L	Nilai Per Indikator							Total Nilai dengan Pembobotan	Predikat
	SiRUP	E-Tendering	E-Purchasing	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	E-Kontrak	Kualifikasi Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ		
Kementerian Kesehatan	6	4.90	0.00	2.90	2.80	7.20	35.60	59,3	Cukup

Sumber <https://siukpbj.lkpp.go.id>

Tabel 1.4

Tabel Penilaian Akhir ITKP Kementerian Kesehatan Tahun 2023

Nama K/L	Nilai Per Indikator							Total Nilai dengan Pembobotan	Predikat
	SiRUP	E-Tendering	E-Purchasing	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	E-Kontrak	Kualifikasi Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ		
Kementerian Kesehatan	9.88	4.63	0.00	5.00	4.44	7.20	40.00	72.14	Baik

Sumber <https://siukpbj.lkpp.go.id>

Berdasarkan Informasi APBN 2023 pada Tabel 1.5 tersaji 5 kementerian berdasarkan nilai pagu anggaran Kementerian Kesehatan merupakan salah satu dari 5 besar kementerian/lembaga dengan pagu tertinggi. Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian/lembaga dari 5 kementerian dengan pagu anggaran tertinggi dan masih belum pernah mendapatkan nilai (0,00), pada indikator *e-purchasing* pada penilaian ITKP Tahun 2022 dan 2023.

Tabel 1.5

Tabel Nilai ITKP Kementerian/Lembaga Tahun 2022 dan 2023 untuk Indikator *e-Purchasing* Berdasarkan Pagu Tertinggi Tahun 2023

No	Kementerian/Lembaga	2022	2023
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	3,23
2	Kementerian Kesehatan	0,00	0,00
3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	0,00	2,04
4	Kementerian Sosial	0,00	2,45
5	Kementerian Keuangan	3,9	3,16

Sumber: Informasi APBN 2023 dan <https://siukpbj.lkpp.go.id>

Selain itu masih bersumber dari lampiran penilaian ITKP yang dikutip dari <https://siukpbj.lkpp.go.id> untuk Tahun 2022 telah dilakukan penilaian ITKP terhadap 82 kementerian/lembaga dengan hasil sebanyak 51 kementerian/lembaga (62,2%) tidak mendapatkan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 56 kementerian/lembaga (68,3%) yang tidak mendapatkan nilai ITKP untuk Indikator *e-purchasing*, dari jumlah 82 kementerian/lembaga. Berdasarkan data tersebut tergambar bahwa indikator *e-*

*purchasing* merupakan indikator yang paling sulit untuk didapatkan nilainya tergambar dari tingginya jumlah kementerian/lembaga yang gagal untuk mendapatkan nilai pada indikator *e-purchasing* bahkan jumlahnya meningkat dari Tahun 2022 ke Tahun 2023.

Tabel 1.6

Tabel Jumlah Kementerian/Lembaga yang Gagal Mendapatkan Nilai ITKP pada Setiap Indikator Tahun 2022 dan 2023

Indikator	Jumlah Kementerian/Lembaga	
	2022	2023
SIRUP	29	9
e-Tendering	5	5
<b>e-Purchasing</b>	<b>51</b>	<b>56</b>
Toko Daring	-	0
Non eTendering/Non ePurchasing	56	44
e-Kontrak	5	7
Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	14	8
Tingkat Kematangan UKPBJ	32	14

Penilaian ITKP Minimal Baik menjadi salah satu indikator sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan atas tiga tingkatan yaitu makro, meso dan mikro. Pada tingkat meso, program RB dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector* atau dalam struktur organisasi reformasi birokrasi nasional disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi yang termasuk dalam UPRBN tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Instansi yang menjadi *leading sector* program bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya. LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu *leading sector* dalam tingkat meso, khususnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara terbagi, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Berkaitan dengan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat indikator *e-purchasing* pada Indeks Tata Kelola Pengadaan yang merupakan indikator yang paling sulit dicapai oleh kementerian/lembaga termasuk Kementerian Kesehatan, maka menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan strategi peningkatan nilai indeks tata kelola pengadaan untuk indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas terhadap strategi peningkatan penilaian ITKP untuk Indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan maka identifikasi masalah yang terlihat yaitu:

1. Nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* tidak pernah mendapatkan nilai;
2. Nilai indikator pemanfaatan *e-purchasing* bergantung pada kualitas pelaksanaanya di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Kementerian Kesehatan belum pernah mengevaluasi kinerja pemanfaatan *e-purchasing* dalam rangka penilaian ITKP di Kementerian Kesehatan.
4. Belum adanya strategi untuk peningkatan nilai ITKP pada indikator *e-purchasing*

### **C. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan diatas terhadap strategi peningkatan penilaian ITKP untuk Indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan maka peneliti membuat beberapa rumusan permasalahan yaitu:

1. Kenapa nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* di Kementerian Kesehatan masih 0?
2. Bagaimana strategi peningkatan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* di Kementerian Kesehatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penyampaian rumusan permasalahan di atas terhadap strategi peningkatan penilaian ITKP untuk Indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa pelaksanaan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Mengidentifikasi penyebab nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* di Kementerian Kesehatan masih 0;
2. Menyusun strategi peningkatan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian terkait strategi peningkatan penilaian ITKP untuk Indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu administrasi negara pada sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Produk penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan para pejabat pembuat komitmen di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai strategi peningkatan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing*.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai penutup dari tesis ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian akan disampaikan pula saran yang didasarkan pada hasil kesimpulan. Saran dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan nilai ITKP pada indikator *e-purchasing*.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan hasil telaah dokumen wawancara untuk peningkatan nilai ITKP pada indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan didapatkan Kesimpulan sebagai berikut ini

##### **1. Penyebab nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* di Kementerian Kesehatan masih 0**

###### **a. Faktor Prosedur**

Masih ada pelaku pengadaan barang/jasa yang belum memahami rangkaian penyelesaian paket *e-purchasing* pada sistem katalog elektronik dan belum menyadari bahwa tidak menyelesaikan paket *e-purchasing* sampai dengan selesai berdampak pada nilai ITKP secara keseluruhan, hal tersebut menyebabkan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* di Kementerian Kesehatan masih 0 karena belum mencapai standar minimal dalam prosedur penilaian.

###### **b. Faktor Sumber Daya Manusia**

Sebagian pelaku pengadaan barang/jasa yang melakukan proses *e-purchasing* adalah pegawai yang memiliki tugas dan fungsi lain sebagai pejabat struktural maupun pekerjaan lainnya, menyebabkan penyelesaian pekerjaan administrasi pada sistem terlewat.

c. Faktor Metode

Penerbitan surat himbauan dan sosialisasi secara daring yang pernah dilakukan juga belum berdampak terhadap peningkatan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing*.

d. Faktor Eksternal

Terdapat faktor eksternal yang menyebabkan tidak selesainya rangkaian proses pengadaan pada sistem katalog elektronik, yaitu respon penyedia pada beberapa tahapan di sistem katalog elektronik.

## **2. Strategi peningkatan nilai ITKP untuk indikator *e-purchasing* di Kementerian Kesehatan**

Dalam pemenuhan nilai ITKP pada indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat peran penting dari PPK/PP dan Penyedia untuk memastikan telah melengkapi seluruh administrasi pada sistem katalog elektronik. Untuk mendukung hal tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah membentuk tim Tim kerja khusus yang menangani pengelolaan sistem katalog elektronik.

Untuk mendapatkan beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, peneliti melakukan wawancara ke *key informan* dan pengumpulan data-data. Berikut di beberapa strategi yang dapat digunakan untuk Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan nilai ITKP terutama indikator *e-purchasing*:

1. Tim kerja khusus yang menangani pengelolaan sistem katalog elektronik di dalam struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat membantu memberikan bimbingan teknis atau sosialisasi secara daring/luring kepada PPK/PP dan penyedia terkait alur proses yang perlu dilengkapi di sistem katalog elektronik dalam pelaksanaan *e-purchasing*.
2. Membuat aplikasi/*tools* monitoring untuk membantu memonitor setiap tahapan pelaksanaan paket-paket *e-purchasing* pada Kementerian Kesehatan yang banyak dan mengkomunikasikan kepada PPK/PP untuk menyampaikan ke penyedia agar melengkapi administrasi di sistem.

3. Melakukan perhitungan kembali terhadap beban kerja bagi PPK/PP guna memastikan pekerjaan-pekerjaan yang rangkap tidak sampai membuat kualitas pekerjaan menjadi berkurang.
4. Membuat surat edaran dan melakukan sosialisasi kepada PPK/PP agar menambahkan klausul pada kontrak terkait dengan kewajiban penyedia untuk menyelesaikan kewajiban administrasi pada sistem katalog elektronik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian strategi dalam meningkatkan nilai ITKP pada indikator *e-purchasing* di lingkungan Kementerian Kesehatan maka penulis memberikan saran serta masukan sebagai berikut:

1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa menetapkan daftar kegiatan sosialisasi teknis dan pendampingan untuk semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan yang akan dilakukan oleh Tim Kerja Katalog Sektoral, serta melakukan penetapan Pegawai Biro Pengadaan Brang/Jasa sebagai PIC pendampingan untuk setiap satuan kerja baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa memerintahkan kepada Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk membuat *monitoring dashboard* agar dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengadaan untuk memantau paket *e-purchasing* yang setidaknya terdapat informasi jumlah paket dan masing-masing status dari setiap paket di *e-purchasing*, untuk selanjutnya disosialisasikan tentang pemanfaatan *monitoring dashboard* ini ke seluruh pelaku pengadaan yang memanfaatkan sistem katalog elektronik.
3. Biro Pengadaan Barang/Jasa melalui Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai pengampu untuk manajemen SDM berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan perhitungan beban kerja untuk pelaku pengadaan barang/jasa, mempertimbangkan pelaksanaan *e-purchasing* pada sistem katalog elektronik

dan wawancara yang dilakukan terbatas dengan *key informan* dari lingkungan Kementerian Kesehatan. Setelah dilaksanakan analisa dan wawancara, terdapat faktor keterlibatan dari penyedia. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menganalisis lebih mendalam terkait dengan keterlibatan penyedia. Analisis selanjutnya bertujuan untuk mendapatkan strategi lain yang lebih cocok diimplementasikan dari sisi penyedia.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, e. t.all (2018). *Penentuan Strategi Pengadaan Fasilitas perkantoran dan konstruksi Universitas Diponegoro dengan menggunakan kraljic' s purchasing portofolio model.*
- Arsana, I.P.J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.*
- Buana & Widiatmoko. (2019). *Pengaruh Kepatuhan Satker pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binopslat.*
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif (II). Kencana*
- Dwi Purnomo. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Di Provinsi Kalimantan Bara.*
- Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. (2022)
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2003)
- Kettner M. Peter. (2002). *Acheiving Excellence in The Management of Human Service Organizations. A Person Education Company. Boston.*
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.*
- Lestyowati. (2018). *Analisis permasalahan e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa satuan kerja*
- Lexy J, Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.*
- Li & Guo. (2022). *Performance Management of University Financial Budget Execution Relying on Comprehensive Budget Management Strengthening Model*
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik.*
- Mawarni et.al (2020). *Penerapan prinsip pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog*

- Nana Sudjana dan Ibrahim. (2009) *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*.
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2010).
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing. (2016)
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (2018)
- Sodikin. (2021). *Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan IKPA*
- Suliantoro , Hery. (2020). *Meningkatkan Kinerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Project Management Maturity Model (PMMM) pada Unit Kerja Pengadaan Pemerintah Daerah*.
- Suharsimi Arikunto. (1992). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Sujdarwo. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Teten (2020). *Penerapan prinsip-prinsip e-procurement di bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota samarinda*.
- Wicaksono , Purnawan Adi, dkk (2007). *Analisis Pengukuran Kinerja Pengadaan Menggunakan Metode Sink's Seven Performance Criteria*
- Yusuf, A.M (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*.